

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UPT P2TK berhasil melakukan transformasi pelayanan, yakni dari sistem yang bersifat konvensional menuju sistem yang lebih modern dan revolusioner. Pada pelayanan konvensional sebelumnya, proses administrasi cenderung lambat, birokratis, dan membutuhkan banyak waktu serta tenaga, baik dari pihak petugas maupun calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, dengan adanya transformasi berbasis inovasi, pelayanan kini menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis Agile Governance, dapat disimpulkan bahwa penerapan enam prinsip tata kelola adaptif menurut Luna , (2015) telah memberikan arah yang jelas dalam membangun layanan yang adaptif pada kebutuhan pengguna.

a. Good Enough Governance

UPT P2TK menerapkan transparansi prosedur, biaya, dan persyaratan melalui media sosial serta banner informasi. Efisiensi pelayanan ditunjang teknologi, sehingga proses lebih cepat dan tepat. PMI juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui layanan bursa kerja legal dan mekanisme pengaduan sesuai Perda Jatim No. 4 Tahun 2016. Responsivitas terlihat dari penanganan kasus deportasi dan upaya meminimalisir PMI ilegal melalui penyediaan informasi kerja resmi. Yang dilihat melalui legitimasi dan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan, partisipasi, dan responsivitas.

b. Business Driven

Pelayanan berorientasi pada nilai (*value orientation*) dengan manfaat nyata, baik devisa negara maupun peningkatan ekonomi keluarga PMI. Perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (PMI, keluarga, pemerintah), misalnya melalui layanan *Digikonseling* daring. Evaluasi juga dilakukan dengan survei kepuasan (IKM) untuk memastikan hasil layanan memberikan manfaat langsung bagi penerima.

c. Human Focused

PMI menjadi pusat perhatian dengan diberi ruang menentukan negara tujuan sesuai minat dan bakatnya. Prinsip ini menegaskan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan pilihan pekerja migran.

d. Based On Quick Wins

Transformasi layanan dilakukan bertahap dan cepat, seperti perubahan dari aplikasi Simpadu-PMI menjadi Jatim Migrant Care yang kini dilengkapi fitur perlindungan keluarga. Keberhasilan kecil ini memicu perbaikan berkelanjutan.

e. Systematic and Adaptive Approach

UPT P2TK adaptif menghadapi perubahan dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi. Dari yang semula hanya luring, kini tersedia layanan daring untuk memenuhi kebutuhan publik yang dinamis.

f. Simple Design and Continous Refinement

Simple design and continous refinement adalah prinsip yang menerangkan mengenai kesederhanaan yang digunakan sebagai penyempurna keberlanjutan yang tetap menjaga kualitas dan standar pelayanan. seperti dalam pelayanan yang ada di

UPT P2TK terdapat beberapa instansi yang terintegritas dari beberapa instansi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Polda Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan lain-lain.

Dari sisi keefisienan, transformasi ini membuat layanan dapat dilakukan dengan lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Sementara dari sisi keefektifitasan, pelayanan mampu menjawab kebutuhan PMI secara tepat sasaran, mulai dari proses penempatan hingga perlindungan ketika menghadapi permasalahan di luar negeri. Secara keseluruhan, transformasi pelayanan UPT P2TK ini menunjukkan penerapan prinsip agile governance, di mana pelayanan publik diarahkan untuk lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan serta perlindungan masyarakat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia.

5.2 SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki saran untuk penelitian selanjutnya seperti

1. perlunya kajian lebih dalam mengenai aplikasi yang digunakan oleh UPT P2TK seperti Simpadu-PMI atau Jatim Migrant Care mulai dengan bagaimana penggunaan sampai dengan anggaran, selain itu seiring dengan perkembangannya zaman *agile governance* perlu adanya inovasi sebagai perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga penelitian yang akan datang perlu untuk mensinkronkan antara peran pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada dengan kebutuhan maupun keinginan masyarakat.

2. Saran terhadap UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur supaya melakukan arahan dan masukan dari peraturan yang ada. Dalam penempatan dan perlindungan, Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak se Indonesia dalam melakukan pelayanan sehingga perlu untuk penambahan anggaran khusus yang dibuat untuk UPT P2TK dalam pemeliharaan sistem pelayanan dan perlindungan PMI.
3. Perlu adanya koordinasi mengenai kejelasan aplikasi yang digunakan, agar tidak merubah berkali-kali aplikasi, mungkin untuk inovasi dapat dikembangkan melalui satu aplikasi saja. Serta memiliki pengajuan anggaran khusus dalam mengelola aplikasi.